

Perancangan Gedung Kantor Dinas PUPR Kabupaten Lembata dengan Pendekatan Arsitektur Neo-Vernakular

Michael A. R. Tegaona¹⁾, I Gusti N. W. Hardy²⁾, Yohanes W. D. Kapilawi³⁾

^{1),2),3)} Program Studi Arsitektur, Fakultas Sains dan Teknik, Universitas Nusa Cendana, Kupang

Abstrak

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 memuat tentang pembentukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Lembata. Sampai pada saat ini, Kabupaten Lembata belum memiliki gedung instansi resmi untuk menjalankan tugas dan fungsi PUPR Kabupaten Lembata yang begitu kompleks. Oleh karena itu, perancangan ini bertujuan merancang gedung kantor dinas PUPR Kabupaten Lembata dengan fasilitas yang sesuai kebutuhan serta mampu mewujudkan lingkungan binaan yang terhubung dengan unsur kebudayaan lokal. Perancangan kantor dinas PUPR Kabupaten Lembata dengan pendekatan Arsitektur Neo-Vernakular yaitu perancangan dengan mengekspresikan jiwa budaya setempat kedalam bentuk, nilai, dan seni. Terinspirasi dari arsitektur kebudayaan Lamaholot; Korke Bale (Rumah Pemujaan) yang memiliki ciri khas 'terbuka' dengan bentuk atap limas bertingkat, ukiran/relief pada kolom, lantai dari bulu/bambu cacah (kneka) yang dikombinasikan dengan material dan gaya yang lebih baru. Desain yang dihasilkan berupa gedung Kantor Dinas PUPR Kabupaten Lembata yang mengaplikasikan Arsitektur Neo-Vernakular, penerapannya dapat dilihat pada layout makro, kolom, dan ornamen sebagai elemen Neo-Vernakular dari kebudayaan Lamaholot. Tujuan dari perancangan ini, yakni mampu menghasilkan bangunan yang mampu mewadahi segala fungsi Dinas PUPR Kabupaten Lembata, dengan memadukan unsur kebudayaan Lamaholot yang mampu meleburkan nilai karakter serta keterhubungan di dalam masyarakat.

Kata-kunci: Dinas PUPR Lembata, Arsitektur, Neo-Vernakular, kebudayaan Lamaholot, Korke Bale

Abstract

Regional Regulation (Perda) of Lembata Regency Number 1 of 2020, stated the establishment of the Public Works and Spatial Planning office type B which organizes mandatory government affairs in the field of public works and spatial planning of Lembata Regency. Until now, Lembata Regency does not have an official agency building for the PUPR office to carry out the tasks and functions of the Lembata Regency PUPR which is so complex. Therefore, this design aims to design a PUPR office building in Lembata Regency with facilities that meet the needs and are able to create a built environment that is connected to local cultural elements. The design of the Lembata Regency PUPR office with a Neo-Vernacular Architecture approach is designed by expressing the spirit of local culture into forms, values, and art. Inspired by the cultural architecture of Lamaholot; Korke Bale (Worship Place) which has a characteristic 'open' with the form of a multi-storey limas roof, carvings/reliefs on columns, floors made of chopped feathers/bamboo (kneka) combined with newer materials and styles. The purpose of this design is to be able to produce a building that is able to accommodate all functions of the Lembata Regency PUPR Office, by combining elements of Lamaholot culture that are able to fuse character values and connectedness in the community.

Keywords: PUPR office Lembata Regency, Architecture, Neo-Vernacular, Lamaholot culture, Korke Bale

Kontak Penulis

I Gusti Ngurah Wiras Hardy
Prodi Arsitektur, Fakultas Sains dan Teknik, Universitas Nusa Cendana
Jl. Adi Sucipto, Penfui 85001
Telp: +62-0380-881590
E-mail: ihardy@staf.undana.ac.id

Pendahuluan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten/kota merupakan instansi kesekretariatan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Republik Indonesia yang berkedudukan di kabupaten/kota yang merupakan representasi dari Kementerian PUPR RI yang mempunyai tugas menyelenggarakan otonomi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada taraf kabupaten/kota, sesuai dengan target pembangunan daerah kabupaten/kota tersebut.

Kantor Dinas kesekretariatan PUPR RI di Kabupaten Lembata untuk sementara bertempat di gedung yang sebelumnya menjadi bekas kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lembata yang dibangun sekitar tahun 1999-2000. Bangunan ini yang secara struktural sudah tidak sekokoh dahulu, mengingat gedung yang cukup tua ini telah melewati beberapa peristiwa bencana alam seperti gempa bumi yang kerap terjadi di Pulau Lembata, sehingga terdapat beberapa tambalan akibat retakan pada dinding maupun struktur bangunan yang lain, serta visual yang sudah kusam dimakan usia, menjadikannya kurang ideal untuk melaksanakan aktifitas dinas di dalam dan di sekitar gedung tersebut.

Fungsi tiap bidang yang ada pada Dinas PUPR Kabupaten Lembata begitu kompleks, sehingga mengharuskan adanya hubungan aktivitas antara fungsi yang difasilitasi dengan baik agar kegiatan pada kantor tersebut dapat berjalan secara optimal. Pada kenyataannya, terdapat beberapa kekurangan pada gedung Kantor Dinas PUPR Kabupaten Lembata yakni; keadaan ruang kantor yang terlalu sempit dan belum sesuai standar, penataan tata letak perabot yang belum ideal, pengelolaan lahan parkir yang belum memadai, belum adanya fasilitas penunjang operasional berupa bengkel/workshop di area kantor, ruang arsip dan penyimpanan yang belum optimal penggunaannya, tidak terdapat ruang makan/kantin maupun ruang istirahat bagi pengelola/pegawai, dan letak kantor yang tidak terintegrasi dalam zona integritas dengan instansi lain.

Mengingat kompleksitas tugas dan fungsi instansi terkait, maka perlu adanya proses perancangan guna menghasilkan objek bangunan Kantor Dinas PUPR di Kabupaten Lembata yang mampu mewadahi segala kegiatan organisasi dengan baik, agar aktifitas koordinasi tiap elemen di dalamnya bisa berjalan dengan baik dan juga efisien untuk memenuhi tujuan pembangunan nasional dari daerah kabupaten.

Dengan memperhitungkan kebutuhan pembangunan daerah jangka menengah, sekaligus mengikis isu krisis kebudayaan yang terjadi di Kabupaten Lembata, maka untuk mengangkat nilai-nilai kearifan budaya setempat dalam perancangan gedung Kantor Dinas PUPR ini akan

menggunakan pendekatan Arsitektur Neo-Vernakular dengan menerapkan prinsip hubungan abstrak terhadap kebudayaan Lamaholot, untuk mengekspresikan kultur, identitas adat dan budaya setempat kedalam bentuk, nilai, dan seni dalam arsitektur.

Secara garis besar penerapan pendekatan ini akan mengambil bentukan dari Rumah Pemujaan (*Korke Bale*) sebagai objek kearifan budaya Lamaholot yang memiliki ciri khas yakni: atap limas bertingkat, 6 tiang penyangga utama, material penutup atap menggunakan elemen rumbia, lantai dari bulu/bambu, dengan penyesuaian unsur modern pada sistem struktur atau materialnya, serta pola ruang makro dari *Korke Bale*, Namang, dan Nuba yang direpresentasikan sesuai kebutuhan dan fungsi pada bangunan Kantor Dinas PUPR Kabupaten Lembata sehingga sesuai dengan prinsip dan karakteristik pendekatan Neo-Vernakular.

Metode

Studi observasi lapangan dan studi literatur digunakan sebagai metode analisis kualitatif dalam penelitian ini. Akumulasi data hasil observasi berupa dokumentasi dan sketsa desain selanjutnya dilaraskan menggunakan metode komparatif dengan membandingkan data dengan hasil studi kasus dan studi literatur untuk menghasilkan sebuah konsep perancangan. Hasil penelitian literatur dari berbagai sumber yang relevan tentang objek kantor dinas PUPR sebagai referensi juga kearifan kebudayaan Lamaholot ditambahkan ke dalamnya. Dimulai dengan mengumpulkan referensi atau literatur terkait *Korke Bale* sebagai objek kebudayaan Lamaholot, penelitian ini akan berkonsentrasi memadukan unsur kebudayaan kedalam lingkungan binaan berupa kantor dinas PUPR Kabupaten Lembata, sebagai upaya untuk mempertahankan kearifan budaya, khususnya dengan mempertahankan karakteristik bangunan, ornamennya, nilai, dan makna dan menjadikan kantor dinas PUPR sebagai ikon budaya Lamaholot.

Hasil dan Pembahasan

Tinjauan Pustaka

Dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas Perda Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2014 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Lembata, tercantum pembentukam dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Adapun Visi dan Misi Dinas PUPR Kabupaten Lembata adalah sebagai berikut:

1. Visi: "Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yang Memadai Berbasis Rencana Tata

Ruang Wilayah Menuju Masyarakat Lembata yang Berdaya Saing.”

2. Misi:

- Mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang daerah yang berkelanjutan, sebagai acuan Pembangunan daerah;
- Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas antar wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyediaan infrastruktur jalan yang andal, terpadu/terkoneksi dan berkelanjutan sesuai rencana tata ruang wilayah;
- Meningkatkan pengelolaan sumber daya air secara efektif dan optimal untuk mendukung produktivitas pertanian dalam rangka ketahanan pangan daerah serta mengurangi daya rusak air;
- Menyediakan dan memperluas pelayanan air bersih perkotaan dan pedesaan;
- Meningkatkan permukiman yang layak huni dan produktif melalui pembinaan dan penyediaan infrastruktur permukiman yang memadai;
- Menyelenggarakan pengaturan bangunan gedung agar memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan berbasis penataan ruang daerah;
- Meningkatkan kemampuan teknis aparatur di bidang tugasnya dengan dukungan sarana/prasarana yang memadai;
- Menyelenggarakan manajemen dengan dukungan sumber daya (aparatur, sarana/prasarana) yang memadai;
- Meningkatkan komunikasi dan pembinaan serta pemberian kepastian hukum bagi pelaku usaha jasa konstruksi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi di daerah.

Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan

Bangunan gedung, dan persyaratan pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kabupaten/Kota atau Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang bersangkutan, yaitu:

- Peruntukan Lokasi Setiap bangunan gedung negara harus diselenggarakan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW Kabupaten/Kota dan/atau RTBL yang bersangkutan.
- Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Ketentuan besarnya koefisien dasar bangunan mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah setempat tentang bangunan gedung untuk lokasi yang bersangkutan.

- Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Ketentuan besarnya koefisien lantai bangunan mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah setempat tentang bangunan gedung untuk lokasi yang bersangkutan.
- Ketinggian Bangunan Ketinggian bangunan gedung negara, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah setempat tentang ketinggian maksimum bangunan pada lokasi, maksimum adalah 8 lantai.
- Ketinggian Langit-Langit Ketinggian langit-langit bangunan gedung kantor minimum adalah 2,80 m dihitung dari permukaan lantai. Untuk bangunan gedung olah-raga, ruang pertemuan, dan bangunan lainnya dengan fungsi yang memerlukan ketinggian langit-langit khusus, agar mengikuti Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dipersyaratkan.
- Jarak Antar Blok/Massa Bangunan Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah setempat tentang bangunan gedung, maka jarak antar blok/massa bangunan harus mempertimbangkan hal-hal seperti:
 - Keselamatan terhadap bahaya kebakaran;
 - Kesehatan termasuk sirkulasi udara dan pencahayaan;
 - Kenyamanan;
 - Keselarasan dan keseimbangan dengan lingkungan.
- Koefisien Daerah Hijau (KDH) Perbandingan antara luas area hijau dengan luas persil bangunan gedung negara, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah setempat tentang bangunan gedung, harus diperhitungkan dengan mempertimbangkan:
 - Daerah resapan air;
 - Ruang terbuka hijau kabupaten/kota. Untuk bangunan gedung yang mempunyai KDB kurang dari 40%, harus mempunyai KDH minimum sebesar 15%.
- Garis Sempadan Bangunan Ketentuan besarnya garis sempadan, baik garis sempadan bangunan maupun garis sempadan pagar harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam RTBL, peraturan daerah tentang bangunan gedung, atau peraturan daerah tentang garis sempadan bangunan untuk lokasi yang bersangkutan.
- Wujud Arsitektur Wujud arsitektur bangunan gedung negara harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Mencerminkan fungsi sebagai bangunan gedung negara;
 - Seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya;
 - Indah namun tidak berlebihan;
 - Efisien dalam penggunaan sumber daya baik dalam pemanfaatan maupun dalam pemeliharannya;

- Mempertimbangkan nilai sosial budaya setempat dalam menerapkan perkembangan arsitektur dan rekayasa; dan
 - Mempertimbangkan kaidah
 - pelestarian bangunan baik dari segi sejarah maupun langgam arsitekturnya.
10. Kelengkapan Sarana dan Prasarana Bangunan Bangunan gedung negara harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana bangunan yang memadai, dengan biaya pembangunannya diperhitungkan sebagai pekerjaan non-standar. Prasarana dan sarana bangunan yang harus ada pada bangunan gedung negara, seperti:
- Sarana parkir kendaraan;
 - Sarana untuk penyandang cacat dan lansia;
 - Sarana penyediaan air minum;
 - Sarana drainase, limbah, dan sampah;
 - Sarana ruang terbuka hijau;
 - Sarana hidran kebakaran halaman;
 - Sarana pencahayaan halaman;
 - Sarana jalan masuk dan keluar;
 - Penyediaan fasilitas ruang ibadah, ruang ganti, ruang bayi/ibu, toilet, dan fasilitas
 - komunikasi dan informasi.

Tinjauan Arsitektur Neo-Vernakular

Arsitektur Neo-Vernakular berusaha menyelaraskan diri dengan alam dan lingkungan, mengakomodasi nilai-nilai filosofis, kosmologis, serta peran budaya lokal yang berkembang di masyarakat dan mewujudkannya dalam bentuk bangunan baru yang memiliki jiwa alam setempat. Arsitektur Neo Vernakular menerapkan konsep-konsep lokal yang dikemas dalam bentuk yang lebih modern.

Ide bentuk diperoleh dari Arsitektur Vernakular setempat namun ditransformasikan dalam bentuk yang baru, karena Arsitektur Neo Vernakular merupakan aliran yang masuk dalam Arsitektur Post-modern maka karakteristik arsitektur ini menurut Heinrich Klotz dibagi menjadi 10 butir karakteristik, yaitu:

1. *Regionalism*: Mengacu kepada gaya regional atau setempat untuk menggantikan gaya internasional yang telah masuk dan berkembang
2. *Fictional Figurative*: Bermain-main dengan figur bangunan untuk memberikan kesan yang beragam.
3. *Fictional*: Mengapresiasikan arsitektur sebagai sebuah karya seni dan menuangkannya dalam suatu bangunan
4. *Communicative*: Memiliki banyak arti dalam suatu wadah bangunan dan berkesan komunikatif kepada pengguna.
5. *Imaginative*: Menggambarkan imajinasi dunia dalam suatu bangunan yang akan dibangun.
6. *No-Sterile*: Menentang paham steril dalam suatu bangun.

7. *Historicism*: dikuasai oleh kenangan dalam sebuah bangunan yang tergambarkan melalui kesan dan pesan yang dituangkan.
8. *Contextual*: Kontekstual dan menyesuaikan dengan lingkungan sekitar (fisik dan non fisik), serta menghargai ungkapan individu atau personal.
9. *No Single Style*: Menghindari langgam tunggal dan mengembangkan vokabulari langgam dan bentuk dalam penerapannya
10. *Fiction=Function*: Fiksi dapat juga berarti fungsi dari suatu bangunan.

Adapun prinsip-prinsip dari arsitektur neo-vernakular adalah sebagai berikut (Kana Putri Jaya Betari, 2021):

1. Memiliki hubungan langsung, artinya bangunan arsitektur neo-vernakular selaras dengan nilai-nilai/fungsi dari bangunan sekarang
2. Memiliki hubungan abstrak, artinya bangunan arsitektur neo-vernakular diterapkan melalui prose analisa tradisi budaya dan arsitektur peninggalan sebelumnya
3. Memiliki hubungan landscape, artinya penerapan arsitektur neo-vernakular juga diterapkan pada lingkungan sekitar, seperti kondisi fisik, juga termasuk topografi dan iklim.
4. Memiliki hubungan kontemporer, artinya pemilihan penggunaan teknologi juga dilakukan, sehingga menghasilkan bentuk yang relevan sesuai dengan konsep arsitektur.
5. Memiliki hubungan masa depan, artinya bangunan arsitektur neo-vernakular juga mempertimbangkan kondisi sebagai antisipasi di masa akan datang.

Kriteria-kriteria yang mempengaruhi arsitektur Neo Vernakular adalah: Bentuk-bentuk menerapkan unsur budaya, lingkungan termasuk iklim setempat diungkapkan dalam bentuk fisik arsitektural (tata letak denah, detail, struktur dan ornamen). Tidak hanya elemen fisik yang diterapkan dalam bentuk modern, tetapi juga elemen non fisik yaitu budaya pola pikir, kepercayaan, tata letak yang mengacu pada makro kosmos dan lainnya menjadi konsep dan kriteria perancangan. Produk pada bangunan ini tidak murni menerapkan prinsip-prinsip bangunan vernakular melainkan karya baru (mengutamakan penampilan visualnya).

Menurut Charles Jencks dalam bukunya *Language of Post-Modern Architecture* (1986), Arsitektur Neo Vernakular memiliki karakteristik desain sebagai berikut:

1. Menggunakan atap bubungan.
2. Penggunaan elemen konstruksi lokal seperti batu bata.

3. Penggunaan bentuk-bentuk tradisional yang ramah lingkungan dengan proporsi yang lebih vertikal.
4. Adanya interior yang terbuka melalui elemen yang modern dengan ruang terbuka di luar bangunan.
5. Warna-warna yang kuat dan kontras.

Hasil Desain

Lokasi Perancangan



Gambar 1. Lokasi Perancangan Gedung Kantor Dinas PUPR Kabupaten Lembata

Lokasi perancangan berada di Jalan Trans Lembata, Lamahora, Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Site memiliki dimensi sebagai berikut: Panjang: 84,00 m²; Lebar: 68,00 m²; Keliling: 304 m²; Total luasan: 5.712 m². Batas Utara: Lahan Pemda, Batas Selatan: Kantor Dinas Pariwisata, Batas Timur: Lahan Pemda, Batas Barat: Jalan Raya, Kantor Dukcapil

Site berada di atas tanah milik Pemerintah Daerah dengan peruntukan pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2042. Berada di jalan lokal sekunder yakni Jl. Lewoleba yang menghubungkan beberapa instansi pemerintah dalam satu lingkungan. Cukup mudah diakses oleh kendaraan (umum/pribadi). Di sekitar site merupakan lingkungan perkantoran yang kondusif (cukup tenang, aman, dan nyaman) dan jauh dari area kumuh. Site berdekatan dengan instansi yang erat kaitannya dengan fungsi objek perancangan, seperti Dinas Pertanahan, dan fasilitas umum, seperti Terminal. Kondisi kontur yang relatif kurang rata, dengan kemiringan $\pm 5\%$. Jaringan utilitas disekitar site cukup baik, yakni jalur instalasi listrik.

Analisis Fungsi dan Kebutuhan Ruang

1. Fasilitas objek perancangan berdasarkan kelompok fungsi

Tabel 1. Kelompok Fungsi

Kelompok Fasilitas	Sarana dan Prasarana
Primer	Kantor Dinas PUPR
Sekunder	Lapangan Upacara, Drop Off, Lobby, R. Tunggu, R. Resepsionis, R. Rapat

Penunjang	Area Parkir (Pengelola, Umum, dan Khusus)
Service	Toilet, Gudang, Ruang Kontrol CCTV
Tersier	Tempat Pembuangan Sampah (TPS)
	Taman/RTH(Ruang Terbuka Hijau)

2. Pelaku kegiatan

Jenis dan jumlah pelaku/pengguna dianalisis berdasarkan data internal struktur organisasi instansi PUPR Kab. Lembata, serta spekulasi penambahan pelaku/pengguna dari faktor eksternal.

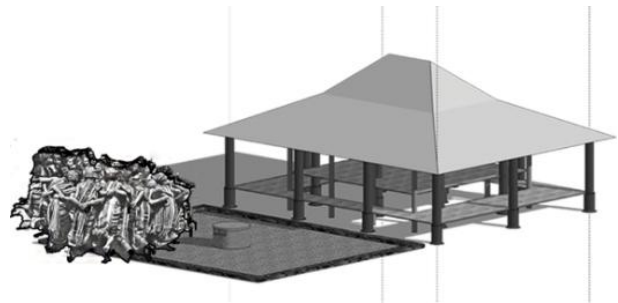
Tabel 2. Jenis dan Jumlah Pelaku/Pengguna

Jenis Pelaku	Jumlah Pelaku (orang)
Kepala Dinas	1 Orang
Sekretaris	1 Orang
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	4 Orang
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	4 Orang
Bidang Jasa Konstruksi	3 Orang
Bidang Cipta Karya	4 Orang
Bidang Bina Marga	4 Orang
Bidang Sumber Daya Air	4 Orang
Bidang Tata Ruang	4 Orang
Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis	7 Orang
Security	2 Orang
OB (Office Boy)	2 Orang
Pengelola Kantin Kantor	2 Orang
Penjabat Menteri, Gubernur, Bupati beserta jajarannya (Rombongan)	10 Orang
Penjabat Inspektorat	3 Orang
Masyarakat	4 Orang
Pelajar/ Mahasiswa	5 Orang
Total	91 Orang

Penerapan Pendekatan Arsitektur Neo-Vernakular

Berdasarkan prinsip-prinsip Arsitektur Neo-Vernakular, terdapat beberapa penerapan gaya dan karakteristik pada bangunan kantor Dinas PUPR Kab. Lembata:

1. Prinsip Hubungan Langsung



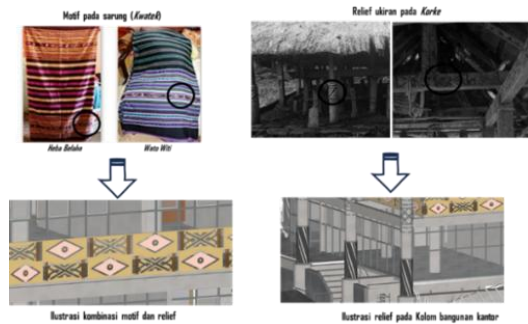
Gambar 2. Ilustrasi hubungan langsung

Penerapan pendekatan Arsitektur Neo-Vernakular pada bangunan kantor Dinas PUPR Kab. Lembata selain untuk melestarikan budaya Lamaholot, namun juga untuk menghadirkan nilai-norma sakral dari bangunan rumah adat *Korke Bale* (rumah pemujaan) ke dalam jiwa bangunan kantor Dinas untuk mengikat tiap elemen organisasi instansi di dalamnya.



Gambar 3. Penerapan Hubungan Langsung Arsitektur Neo Vernakular pada Eksterior dan Interior Kantor Dinas PUPR

2. Prinsip Hubungan Abstrak



Gambar 4. Ilustrasi Hubungan Abstrak

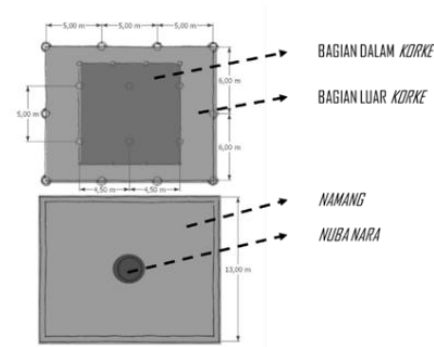
Bangunan kantor Dinas PUPR, merupakan hasil peleburan dari aspek dan elemen kebudayaan Lamaholot seperti hubungan ruang *Korke*, *Namang*, dan *Nuba Nara* pada layout kantor, serta ukiran pada kolom *Korke* dan motif sarung tenun *kwatek* sebagai elemen dekoratif.



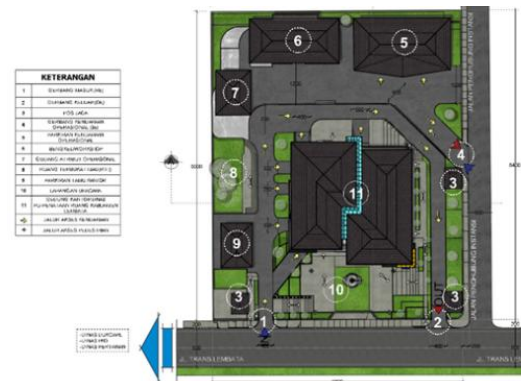
Gambar 5. Penerapan Hubungan Abstrak Arsitektur Neo-Vernakular Pada Bangunan Kantor Dinas PUPR

3. Prinsip Hubungan Landscape

Menyesuaikan dengan layout/kondisi lingkungan pada kantor Dinas PUPR yang selaras dengan layout *Korke Bale* difokuskan pada tata lahan pada tapak yang sesuai dengan pola ruang yaitu *Korke*, *Namang*, dan *Nuba*.



Gambar 6. Ilustrasi layout landscape



Gambar 7. Penerapan Hubungan Abstrak Arsitektur Neo-Vernakular pada Site Plan Bangunan Kantor Dinas PUPR

4. Prinsip Kontemporer



Gambar 8. Ilustrasi Hubungan Kontemporer

Penggunaan teknologi dan material terbaru seperti konstruksi Baja WF, Beton komposit, Laser Cutting, dan unsur seperti Sekondary skin Baja hollow dan ACP merupakan respon terhadap paparan sinar matahari yaitu upaya shading (sekon skin) sekaligus membantu tampilan bangunan kantor dengan penerapan Neo-Vernakular tetap relevan terhadap perkembangan jaman



Gambar 9. Penerapan Hubungan Kontemporer Arsitektur Neo-Vernakular pada Fasade Bangunan Kantor Dinas PUPR

5. Prinsip Hubungan dengan masa depan



Gambar 10. Ilustrasi hubungan masa depan

Bangunan kantor juga memiliki standar keselamatan yang harus diperhatikan, sehingga pada Kantor Dinas PUPR Kab. Lembata terdapat konsep Tanggap Bencana, dalam hal ini menghadirkan fasilitas tangga darurat, jalur evakuasi, dan titik kumpul pada bangunan dan kawasan Kantor Dinas PUPR Kab. Lembata.



Gambar 11. Perspektif halaman 'Titik Kumpul'

Penutup

Pendekatan Arsitektur Neo-Vernakuler dalam perancangan Kantor Dinas PUPR Kabupaten Lembata menawarkan solusi yang harmonis antara fungsi modern dan konteks lokal. Dengan memanfaatkan elemen desain yang dijiwai oleh tradisi arsitektur Lamaholot, pendekatan ini menciptakan bangunan Kantor Dinas PUPR yang tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional dan teknis, tetapi juga mencerminkan identitas budaya dan lingkungan setempat. Pendekatan ini mendukung penciptaan ruang yang tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif tetapi juga memperkuat identitas komunitas. Dengan mengintegrasikan motif dan gaya karakteristik kebudayaan Lamaholot, Kantor Dinas PUPR Kab. Lembata dapat menjadi landmark yang mencerminkan nilai-nilai dan karakter Kabupaten Lembata, selain itu juga mampu memperkuat rasa kebanggaan dan keterhubungan di antara lingkungan masyarakat. Secara keseluruhan, perancangan Kantor Dinas PUPR Kab. Lembata dengan pendekatan Arsitektur Neo Vernakular menghasilkan sebuah bangunan yang bukan hanya memenuhi fungsi dari kebutuhan Kantor Dinas PUPR, tetapi juga menjadi bagian dari lingkungan dan budaya Lamaholot. Menciptakan ruang formil yang menghargai tradisi sambil tetap siap menghadapi tantangan masa depan.

Daftar Pustaka

- Atasoge, Anselmus. dkk. (2023). Korke: Rumah Moderasi Beragama Masyarakat Lamaholot di Flores Timur. Vol. 09. No. 01, Juni 2023. Hal 37-38.
- Betari, Kana. dkk. (2021), Penerapan Konsep Arsitektur Neo Vernakular pada Perancangan Kantor Bupati Kabupaten Pidie, Vol. 5, No.1, Februari 2021, hal 26-30
- Dzuliyani, W. O. 2020 . Penerapan Konsep Arsitektur Modern pada Kantor Dewan Perwakilan. GARIS- Jurnal Mahasiswa Jurusan Arsitektur (E- ISSN : 2503-3344), 119. Volume 5 No. 2
- Eka, Anastasia. dkk. 2020. Arsitektur Neo Vernakular sebagai Salah Satu Aspek Penunjang Pelestarian Kebudayaan Lamaholot. (ISSN: 2722-2756) TEKSTUR: Journal of Architecture, Vol. 1, No. 2, Hal 133-138, Oktober 2020
- Jencks, Charles. 1981. The language of post-modern architecture. Rizzolli International Publications, Incorporated. New York.NY.USA
- Kedan, Petronela. 2013. The Changing Value and Meaning of Kewatek-Traditional Textile, in Adonara Island and Java, Indonesia. (RDS-80433). Hal 38. Agustus, 2013
- Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2006. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung: Jakarta
- Peraturan Bupati Lembata 2020. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lembata Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lembata
- Peraturan Presiden No. 73 di dalam Qatrunnad Firyal. dkk, 2019. Jurnal Perancangan Tugas Akhir Perancangan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Serang. Vol.6, No.2, Agustus 2019. Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011 mengenai Pembangunan Bangunan Gedung Negara, 11 Oktober 2011
- Peraturan Presiden. 2020. Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.